

**BUANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI MELALUI BUMDes
DI DESA WANASARI**

Meliana Puspitasari

**Universitas Buana Perjuangan Karawang
Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang
meliana@ubpkarawang.ac.id**

Abstrak

Menurut Undang-Undang tentang desa nomor 6 tahun 2014, pemerintah mendorong desa untuk dapat mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri, salah satu aspeknya yaitu program ekonomi unggulan. Tujuan dari optimalisasi potensi ekonomi adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya potensi sumber daya yang dimiliki guna memperbaiki kualitas ekonomi penduduk di desa. Pemerintah perlu mengkaji dan memetakan potensi ekonomi desa sebagai sumber daya lokal. Pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan membentuk BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah wawancara dilakukan kepada beberapa perangkat desa, lalu diadakan diskusi dan tanya jawab. Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya tindak lanjut dari pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, optimalisasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan belum maksimal pelaksanaan BUMDes di desa Wanasari. Kesimpulan yang diperoleh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di desa wanasari adalah tindak lanjut dari pelatihan kewirausahaan, pengelolaan sumber daya alam yang harus terus dilakukan oleh perangkat desa kepada penduduk dan optimalisasi organisasi yang menangani perekonomian desa yaitu BUMDes. Tindak lanjut ini diharapkan terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi di desa Wanasari.

Kata kunci: Potensi Ekonomi, BUMDes, Wanasari.

Abstract

According to Law on Villages number 6 of 2014, the government encourages villages to be able to manage budget funds for villages independently, one aspect of which is the superior economic program. The purpose of optimizing economic potential is to increase awareness of the importance of potential resources to improve the economic quality of the population in the village. The government needs to study and map the economic potential of the village as a local resource. The approach taken by the government is to form BUMDes as an economic institution for rural communities. The method used was interviews conducted with several village officials, then held discussions and questions and answers. The problems that occur are the absence of follow-up from the implementation of entrepreneurship training, optimization of the community in managing natural resources and the absence of BUMDes in Wanasari Village. The conclusions obtained to overcome the problems that occur in Wanasari village are the follow-up of entrepreneurship training, natural resource management that must be carried out by village officials to the population and the formation of an organization that handles the village economy, namely BUMDes. This follow-up is expected to realize the optimization of economic potential in Wanasari village.

Keywords: *Economic Potential, BUMDes, Wanasari*

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi desa menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi diseluruh pelosok Indonesia. Kurang lebih dalam sepuluh terakhir ini pemerintah pusat telah gencar menggenjot perekonomian daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sejalan dengan satu dari tujuh belas kesepakatan bersama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan tersebut tertuang menjadi beberapa target, salah satunya adalah menurunkan masyarakat kategori miskin menurut standar nasional menjadi separuhnya. Dengan potret sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diharapkan dapat membantu mencapai target yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals*.

Dari segi ekonomi, sekurangnya ada tiga faktor utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Tiga faktor utama tersebut menurut Fauzi (2004) antara lain;

1. Moral

Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.

2. Ekologi

Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

3. Ekonomi

Alasan dari sisi ekonomi masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga aspek berkelanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi.

Todaro dan Smith (2012) berpendapat pembangunan yang direncanakan sebagai *surest and direct route to economic growth*. Pada beberapa negara perencanaan dilaksanakan secara top down, yaitu semua perencanaan pembangunan ekonomi dibebankan kepada pemerintah pusat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah mempersiapkan program pembangunan ekonomi nasional atau roadmap yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik negaranya. Dengan sistem terpusat, pembangunan ekonomi lebih terkendali hanya saja banyak kebijakan yang kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau daerah.

Idealnya, kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional (Abidin 2015, Zainudin 2016), namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. (Attar et al. 2013, Sidik 2015, Zulkarnaen 2016). Pemerintah dengan melalui program-program yang ditujukan ke desa-desa sebagai wujud pemerataan pembangunan dan ekonomi. Salah satu program yang diberikan pemerintah adalah BUMDes.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa. BUMDes menampung kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasarkan potensi asli desa tersebut. Contoh wujud BUMDes yang bisa diterapkan di desa adalah ketika masyarakat desa melakukan panen dan hasilnya

memiliki nilai jual, laba yang diperoleh akan dibagi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, sehingga laba bagi produsen akan menjadi keuntungan murni, sedangkan bagi BUMDes akan diolah dan dikembangkan kembali sehingga memperoleh manfaat lebih. Pengembangan wilayah dapat dilihat pada potensi ekonomi wilayah dan sumberdaya alam yang ada (Regameya dan Kytzia, 2007) serta ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam yang masih cukup tinggi (Niu et al., 2012).

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang dapat memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan untuk percepatan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanzani et al. 2010). Menurut Syahza dan Suarman (2013), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan. Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa (Ulumiyah 2013, Zulkarnaen 2016).

Peran strategis pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pencapaian TPB sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator TPB berjalan baik di tingkat lokal. Salah satu keterlibatan daerah adalah dalam penyusunan dokumen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021. Potensi ekonomi di desa Wanasari sangat besar karena memiliki kekayaan alam berupa lahan pertanian dan lahan kebun yang luas, serta letaknya yang tidak jauh dari keramaian kota. Luas total tanah (Ha) 350.861,6 luas tanah fasilitas umum 10.842, 5, luas tanah sawah 184.418,1 dan luas tanah kering 155.601.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa. Perangkat desa telah mengetahui mengenai program BUMDes berdasarkan program pemerintah sebelumnya, namun karena kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut maka organisasi yang fokus dalam perekonomian masyarakat tersebut belum optimal. Permasalahan BUMDes tidak hanya terjadi di desa Wanasari saja tetapi di Kabupaten Karawang seperti yang disampaikan oleh Jabarnews (Jumat, 08 Mei 2020) Sejak digulirkan 2017 lalu, program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dinilai belum maksimal. Padahal di sisi lain anggaran dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut Alek Sukardi hal ini terjadi karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kurang dalam melakukan pembinaan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antardesa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, program penyuluhan pengembangan Badan Usaha Milik desa dan Penilaian Potensi Ekonomi desa di desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan BUMDes dan sarana untuk mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya sampai dengan penyuluhan saja, tetapi diperlukan tindak lanjut agar keberlangsungan BUMDes tetap bertahan di desa Wanasari.

METODE

Metode yang digunakan dalam laporan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara wawancara dengan perangkat desa Wanasari. Permasalahan yang terjadi di desa Wanasari adalah belum terbentuknya organisasi yang menangani masalah perekonomian. Sehingga kurang optimal dalam membangun perekonomian desa tersebut. Untuk membangkitkan minat dan keinginan masyarakat desa Wanasari untuk mendirikan BUMDes, maka dilakukan program penyuluhan bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai BUMDes dan manfaatnya bagi masyarakat. kegiatan pelatihan atau penyuluhan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah desa, Perwakilan lembaga-lembaga desa dari BPD, LPM, Karang Taruna, Mahasiswa dan Dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang berhasil diperoleh di lapangan tentang potensi dan perkembangan desa Wanasari terdiri dari potensi sumber daya alam Desa Wanasari memiliki luas wilayah 889.562 Ha/m₂ . Luas total tanah (Ha) 350.861,6, luas tanah fasilitas umum 10.842,5, luas tanah sawah 184.418.1 dan luas tanah kering 155.601. Yang terdiri dari 19,4% berupa pemukiman, lahan sawah basah yang di gunakan untuk pertanian sawah teknis terdiri dari 30%, lahan kebun lain. Sekitar 25% sebagaimana wilayah tropis desa Wanasari mengalami musim kemarau dan penghujan dalam setiap tahunnya, rata-rata perbandingan penghujan dan musim kemarau, lebih dominan musim kemarau, tetapi walaupun musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim penghujan, tanaman pertanian khusus nya sawah didesa tidak pernah kekurangan air, karena sawah pertanian seluruhnya medapat aliran air yang cukup sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan kata lain sawah teknis seluruhnya mendapat distribusi air dari irigasi dari pengairan.

Desa Wanasari memiliki beberapa ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Berikut ciri khas Desa Wanasari:

- a. Perbandingan lahan pertanian dengan manusia cukup besar.
- b. Lapangan kerja yang dominan ialah sektor pertanian dan sektor industri.
- c. Hubungan antar warga desa masih sangat akrab.
- d. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Mata pencaharian didominasi oleh petani, berdagang dan pekerja. Data lain yang diperoleh berkaitan dengan sumber daya manusia adalah jumlah penduduk berdasarkan gender dan tingkat pendidikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Gender Penduduk

No	Status	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	2.229
2	Perempuan	2.215

Sumber: Kependudukan Desa Wanasari

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan

No	Status	Jumlah (Jiwa)
1	SD	918
2	SLTP	593
3	SLTA	708
4	D1	271
5	D2	199
6	D3	85
7	S1	17

Sumber: Kependudukan Desa Wanasari

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 51% penduduk desa Wanasari didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 49% penduduk berjenis kelamin perempuan. Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk desa Wanasari tingkat pendidikannya adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan adanya BUMDes seharusnya dapat menjadi harapan bagi peningkatan perekonomian di desa Wanasari.

Usaha mewujudkan BUMDes ini harus dimulai dari mencari kebutuhan dan potensi desa Wanasari. Adapun potensi masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan BUMDes adalah lahan pertanian yang masih luas dan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani. Memilih sumber daya unggul dari penduduk desa yang dapat dipercaya mengelola BUMDes, sumber daya tersebut diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai teknis pelaksanaan dari pencatatan hingga pelaporan sehingga terbentuk keterbukaan informasi dari pengelola kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus selalu memberikan pelatihan dan pendampingan agar BUMdes ini terus bergerak dalam membangun perekonomian desa Wanasari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kajian dari permasalahan yang diatas, maka kesimpulan yang dapat adalah optimalisasi BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri dan meningkat sangat diperlukan. Diharapkan antara Pemerintah Daerah, Perangkat Desa dan masyarakat saling bersinergi agar lebih maksimal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. BUMDes dapat menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat terutama potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Wanasari.

Berdasarkan kesimpulan yang diatas maka saran yang dapat disampaikan guna membangun perekonomian di desa Wanasari adalah:

1. Potensi ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis desa Wanasari adalah pertanian.
2. Perangkat desa melakukan optimalisasi BUMDes dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dan mendorong partisipasi masyarakat desa.
3. Pemerintah pusat terus menjalankan kebijakan BUMDes secara berkelanjutan dengan melakukan pendampingan dan pengawasan dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa Wanasari

DAFTAR PUSTAKA

- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwiadi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan desa ekowisata di Kecamatan Bumiaji–Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68-78.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021
- Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Online Tahun 2020. (2020).
- Desa Wanasari Kab Karawang", Desa Kami Desa Wanasari Kabupaten Karawang <<https://wanasariweb.wordpress.com/desa-kami/>> [diakses pada 23 Agustus 2020].
- Fauzi., Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori & Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Niu X., B. Wang., S. Liu., C. Liu, W. Wei, and P.E. Kauppi. 2012. *Economical assessment of forest ecosystem services in China: Characteristics and implications*. *Ecological Complexity*, 11: 1-11.
- Rafsanjani, H., Bambang S., & Suwondo. (2010). *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi*

- Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik*, 1 (4).
- Regameya, A. and S. Kytzia. 2007. *Integrating the valuation of ecosystem services into the Input– Output economics of an Alpine Region*. *Ecologic Economics*, 63: 786–798.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2012). *Economics Development*. 11th Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 890-899
- Zulkarnaen, M Reza. 2016. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- UU desa No. 006 tahun 2014
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Jabarnews (diakses 15 Oktober 2020).